



PEMERINTAH
KABUPATEN
BENGKALIS

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**



BADAN PENELITIAN **BPP** PENGEMBANGAN

KABUPATEN
BENGKALIS

balitbang.bengkalisKab.go.id bpp.bengkalisKab@gmail.com

Jl. Pertanian No. 457 Kode Pos : 28711



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan rancangan RKPD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS,



Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 69

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2021-2026 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2021-2026 ini di susun untuk menyesuaikan target yang ingin dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, baik yang berupa penelitian dan pengembangan maupun kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Selanjutnya, Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang akan diimplementasikan di dalam mencapai suatu tujuan (goal) organisasi.

Akhirnya, diharapkan dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Bengkalis, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS**

FADHLAN FUAD DAULAY, AP., M.Si

Pembina

NIP. 19751001 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia	11
2.2.2. Sarana dan Prasarana	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	22
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	38

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	47
	6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
	6.2. Kelompok Sasaran	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII	PENUTUP	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.2	Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan	12
Tabel 2.3	Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon	12
Tabel 2.4	Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang ditamatkan	13
Tabel 2.5	Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Usia	14
Tabel 2.6	Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan	14
Tabel 2.7	Daftar Aset yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis	15
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.9	Daftar Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 S/D 2020	24
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	28

Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis	34
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis	10
Gambar 2.	Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	66
Lampiran 2.	Cascading Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	67
Lampiran 3.	Formulasi Strategi Swot Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima Tahunan maupun Tahunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan PD, serta disusun sesuai tugas dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan daerah secara hierarki dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (PD) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan amanat tersebut diatas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Dokumen ini sebagai platform atas pelaksanaan visi dan

misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026. Dengan kata lain, Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

Disamping itu, Peran lembaga litbang berkaitan dengan pengembangan dan pendayagunaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pemanfaatan hasil-hasil litbang di kalangan masyarakat. Hal itu sesuai Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergiunsure kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”. Dalam kapasitas ini, pada Pasal 21 Ayat (4) UU No. 18 Tahun 2002 kembali ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah. Amanat ini mengisyaratkan Balitbang Daerah untuk mengembang tugas dan fungsi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pendayagunaan Iptek dan pemanfaatan hasil-hasil litbang tersebut secara aktif.

Dengan demikian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 sesuai tugas dan fungsinya adalah membuat rekomendasi dibidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang inovasi dan teknologi termasuk didalamnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) serta pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dan pengembangan dipakai

sebagai rumusan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis implementatif oleh Bupati serta pengembangan dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikalangan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah;
2. Melaksanakan amanat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
4. Pedoman bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Strategis Perangkat Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai berikut dengan indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai berikut dengan indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. dimana memiliki tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di tersebut diatas Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan daerah dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. Melaksanakan koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Melakukan Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsinya.

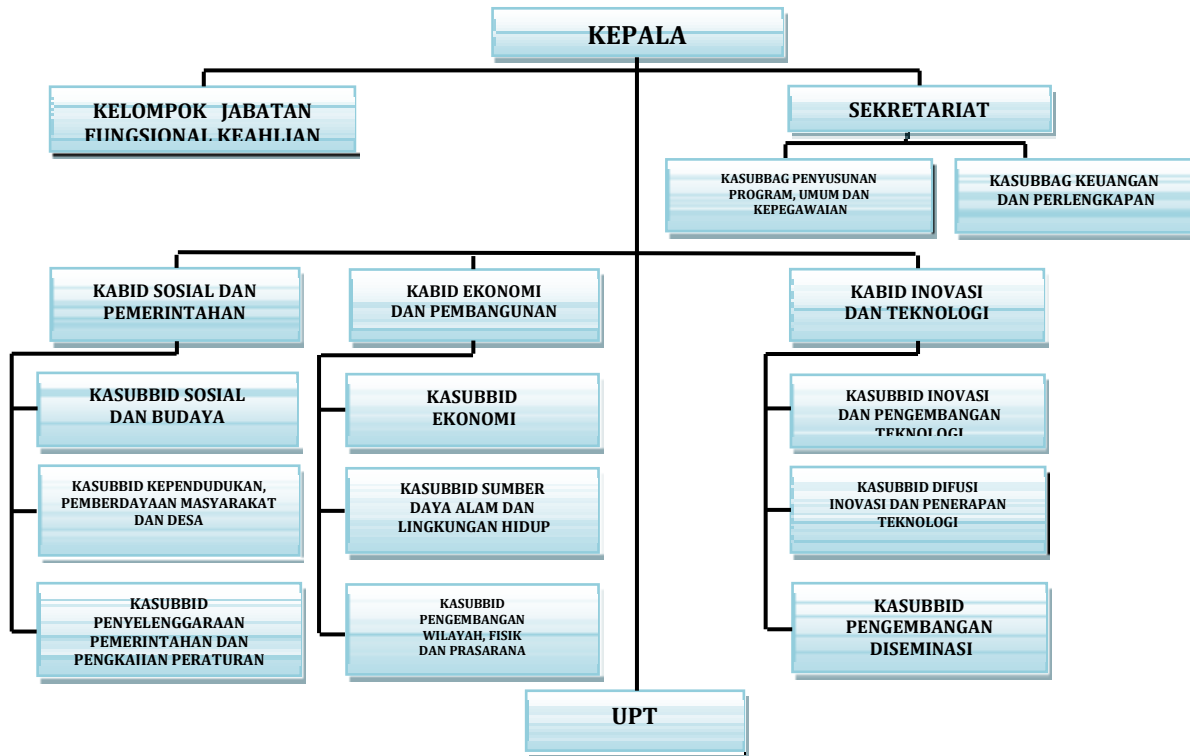
Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Kepala membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penelitian dan pengembangan.
2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkalis



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor : 64 Tahun 2016

Tanggal : 30 November 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan didukung oleh sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sumber daya tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian kemajuan suatu organisasi. Adapun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Januari 2021, jumlah pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah 25 orang PNS. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	2	9	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	0	0	0
5	Staf	9	4	13
TOTAL		14	15	29

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 29 orang PNS lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, 14 orang (48%) adalah laki-laki dan 15 orang (52%) adalah perempuan.

Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis belum merata pada masing-masing unit kerjanya.

Tabel 2.2.
Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	4	3	4	11
2	Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	1	5	0	6
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	5	0	5
4	Bidang Inovasi dan Teknologi	0	1	4	2	7
TOTAL		0	6	17	6	29

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III dan IV, yaitu mencapai 23 orang atau 79%, sedangkan Golongan I dan II hanya sejumlah 6 orang atau 21%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II namun dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3.
Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	1	1	2	4
2	Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	0	1	3	4
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	1	3	4
4	Bidang Inovasi dan Teknologi	0	0	1	3	4
TOTAL		0	1	4	11	16

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 16 jabatan dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut 11 jabatan lebih banyak pada jabatan eselon IV dan sisanya eselon III sebanyak 4 jabatan dan 1 jabatan kepala.

Tabel 2.4.
Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S-1	S-2	
1	Sekretariat	2	1	4	4	11
2	Bidang Sosial dan Pemerintahan	2	0	3	1	6
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	5	0	5
4	Bidang Inovasi dan Teknologi	1	1	3	2	7
TOTAL		5	2	15	7	29

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 15 orang atau sebesar (52%) disusul kemudian pendidikan S2 sebanyak 7 orang (24%) disusul kemudian SMA sebanyak 5 orang (17%) dan Diploma sebanyak 2 orang (7%). Dari Data pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5.
Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Usia

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	0	0	1	3	3	2	2	11
2	Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	0	0	0	2	1	3	6
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	1	0	2	2	0	0	5
4	Bidang Inovasi dan Teknologi	0	0	0	0	2	2	3	7
TOTAL		0	1	1	5	9	5	8	29

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh usia muda dan produktif yakni usia 20 – 50 Tahun sebanyak 21 orang atau (72%) sedangkan selebihnya 8 Orang atau (28%) adalah usia >50 Tahun.

Tabel 2.6.
Komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	PETA JABATAN				JUMLAH
		STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL	AHLI	
1	Sekretariat	4	7	0	0	11
2	Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	2	3	0	6
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	1	3	0	5
4	Bidang Inovasi dan Teknologi	1	3	3	0	7
TOTAL		7	13	9	0	29

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan PNS dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana sebanyak 13 orang atau (45%) sedangkan jabatan Struktural yakni sebanyak 7 Orang atau (24%) dan sisanya jabatan fungsional yakni sebanyak 9 Orang atau (31%). Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mengarahkan para ASNnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan dibidang Penelitian.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.7.
Daftar Aset yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3			
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (OUTLET)	1	1			
4	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	12	2	2	8	

5	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	1	1		
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1			
7	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	1	1			
8	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	3	1		2	
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1			
10	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2	2			
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) Bangunan Tangki Minyak BBN	1	1			
12	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2	2			
13	Pagar Permanen	1	1			
14	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	1			
15	Saluran Drainage	3	3			
16	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2	2			
17	Sumur Gali (SGL)	1	1			
18	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	200	200			
19	Buku Laporan Penelitian	7	7			
20	Buku Umum Lain-lain	189	189			
21	Grafik/Bagan	1		1		
22	Karya Seni Asli Lain-lain (Maked)					
23	Karya Seni Lain-lain (Foto Presiden, wakil dan Lambang Garuda	3	3			
24	Peta (Map)	2			2	
25	Peta Citra Satelit	4	4			

26	Sedan	1		1		
27	Station Wagon	5	5			
28	Pick Up	2	1	1		
29	A.C. Split	32	18	10	4	
30	A.C. Window	4	3	1		
31	alat angkutan darat bermotor lainnya	1			1	
32	Alat Destilasi Air	3	1	2		
33	Alat Kantor Lainnya	3	2	1		
34	alat laboratorium lain lainnya (dst)	14		13	1	
35	alat laboratorium lain lainnya (dst)	20	3	17	1	
36	alat laboratorium lingkungan perairan lainnya (dst)	1	1			
37	alat laboratorium proses pengolahan	1	1			
38	Alat Mensolfinasi Minyak	1	1			
39	Alat Pemadam/Portable	11	11			
40	Alat Penghancur Kertas	11	3	6	1	
41	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	12	3	4	5	
42	Alat Produksi Perikanan lainnya	1			1	Keramba
43	Amplifier	2	2			
44	Aquarium	1			1	
45	Brangkas	3			1	
46	Buffet Kaca	1	1			
47	Buret/Peralatan Titrasi	2	1		1	
48	Camera Electronic	2	1	1		
49	Card Reader (Peralatan Mainframe)	7			7	
50	CCTV - Camera Control Television System	1		1		
51	Desicator	1			1	

52	Destilasi Bertingkat	3		3		
53	Dispenser	2			2	
54	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	1			
55	Exhause Fan	1	1			
56	Fermentor (Alat Laboratorium Pertanian)	10			10	
57	Filing Cabinet Besi	13	9	4		
58	Generator	2	2			
59	Genset	8	6		2	
60	Global Positioning System	2	1		1	
61	Gordyin/Kray	9	1		7	
62	Handy Cam	2	1		1	
63	Hard Disk	12	2		10	
64	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	1	1			
65	Incubator (Alat Laboratorium Umum) teremometer	1	1			
66	Jam Mekanis (jam dinding)	2			2	
67	Kaca Hias	1	1			
68	Kapal Motor (speed Boat)	2		1	1	
69	Kasur/Spring Bed	20	10	2	8	
70	Keramba (Jaring Apung)	15			15	
71	Kompore Gas (Alat Dapur)	1		1		
72	Kursi Biasa	6	6			
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1		1	
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	4		1	
75	Kursi Putar	50	24	11	15	
76	Kursi Rapat	150	142		8	
77	Kursi Tamu	9	5	3	1	
78	Laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2	2			
79	Labu Erlen Mayer	1	1			
80	Laminar Air Flow	1	1			

81	Lap Top	15	8	2	5	
82	Layar infokus	1	1			
83	Lemari Besi/Metal	23	21		2	
84	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	38	8	30		
85	Lemari Es	3	3			
86	Lemari Kaca	5	5			
87	Lemari Kayu	14	4	7	3	
88	Lemari Makan	4		4		
89	Lemari Penyimpan	3	2	1		
90	Loudspeaker	6	4	2		
91	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	1	1			
92	Meja 1/2 Biro	40	26	4	10	
93	Meja Kerja	2	2			
94	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	7	8		
95	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
96	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2		1	1	
97	Meja Komputer	1			1	
98	Meja Makan	1			1	
99	Meja Podium	1	1			
100	Meja Rapat	7	3	2	2	
101	Mesin Bor Tangan	1	1			
102	Mesin Fotocopy Folio	2	1		1	
103	mesin ketik lainnya (dst)	1			1	
104	mesin ketik lainnya (dst)	3	3			
105	Mesin Pemotong Rumput	9	8		1	
106	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2			
107	mesin proses lainnya (dst)	3		3		
108	Microphone	1			1	
109	Note Book	4		4		
110	Oven Listrik	1	1			

111	Overhead Projector	2	2			
112	P.C Unit	19	11	3	5	
113	Peralatan Antena Penerima SSHF	5	3	1	1	
114	PH Meter	5	5			
115	Pompa Air	3	3			
116	Precision scales	1	1			
117	Printer	22	12	2	8	
118	Rak Besi	4	4			
119	Rak Kayu	1		1		
120	Rak-Rak Penyimpan	2	2			
121	Sepeda Motor	15	14		1	
122	Server (KOMPUTER SEVER/ MAINFRAME)	1			1	
123	Sofa	2			2	
124	Soil PH Meter	1	1			
125	Sound System (Power Mixer)	1	1			
126	Stabilizer	3		1	2	
127	Tabung gas	2	2			
128	Tangki Air	1		1		
129	Tangki Meter	3	3			
130	Televisi	8	7	1		
131	Tempat Tidur Besi	21	17	4		
132	Tempat Tidur Kayu	7		7		
133	Termometer Standar	1			1	
134	Timbangan Elektronik	1	1			
135	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1	1			
136	Timer Lab.	5		5		
137	Tool set	2	2			
138	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	2		1	1	
139	Unit Pengolahan Air Kotor (prototype)	1		1		
140	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6			6	

141	Water Distiling	1		1		
142	Water Test	1	1			
143	Water Treatment (Mesin Proses)	2	2			
144	White Board	1	1			
TOTAL		1.284	918	184	179	

Sumber : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis, Tahun 2021

Tabel diatas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis berupatanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis maupun yang ada diseluruh Bangunan Stasiun Riset milik Badan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.284 aset dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 918 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 71,50%. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 184 atau sebesar 14,33%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 179 dengan persentase 13,94%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis di Tahun berikutnya.

Disamping keberadaan asset tersebut diatas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bengkalis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas secara bertahap.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program / kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di urusan penelitian dan pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan bagi para Peneliti melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitas bagi Peneliti.

Tujuannya adalah agar para peneliti mendapatkan kemudahan dalam melakukan penelitian agar dapat memberikan hasil yang baik. Untuk itu, adapun pencapaian strategis dari Badan Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (Tahun 2016-2020) dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	40	45	50	55	60	45	50	60	65	68,5	113	111	120	118	114
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dikembangkan	60	65	70	75	80	70	70	70	75	75	117	108	100	100	94
3	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	40	45	50	55	65	40	45	50	65	68,7	100	100	100	118	106
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan hasil Penelitian	60	65	70	75	80	60	65	70	75	85	100	100	100	100	106

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi ukuran keberhasilan yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan, persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dikembangkan, persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, persentase perangkat daerah yang menggunakan hasil Penelitian dan dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 telah dicapai dengan baik namun hasil tersebut masih belum secara optimal memberikan pemanfaatan kepada rekomendasi pembangunan kabupaten Bengkalis.

Disamping itu, dari hasil capaian kinerja tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan berbagai pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penelitian dan pengembangan daerah. Adapun berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan daerah dari tahun 2015-2020 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.9.
Daftar Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2015 S/D 2020

NO	DAFTAR KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN
1.	Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Ekominawisata Tasik dan Sungai.	2015
2.	Lomba Karya Ilmiah.	2015
3.	Pilot Project Stasiun Riset Bahan Bakar Nabati (Operasional dan Penguji Kendaraan Berbahan Baku Bioetanol Berbagai Tingkat Kadar).	2015
4.	Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Tepat Guna Sawit.	2015

5.	Pilot Project Stasiun Riset Budidaya Perikanan Laut dan Pesisir (Kepiting Soka dan KJA Laut).	2015
6.	Lomba Karya Ilmiah Penelitian Mandiri.	2016
7.	Pilot Project Peragaan Teknologi Pedesaan dan Kondisi Sosial.	2016
8.	DED Pemanfaatn Limbah Batang Sagu / Cangkang Sawit Untuk Pengembangan Energi Biomassa di Kabupaten Bengkalis.	2016
9.	Kajian Pengembangan Potensi Pesisir dan Laut Kabupaten Bengkalis.	2016
10.	Transformasi Kelembagaan Ekonomi Pedesaan dalam Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkalis.	2016
11.	Sistem Informasi Kelitbangan Kabupaten Bengkalis.	2016
12.	Kajian Nilai Kearifan Lokal Sosial, Sejarah dan Budaya Kabupaten Bengkalis.	2016
13.	Pilot Project Teknologi Recycle Sampah Plastik TPA	2017
14.	Kajian Tindak Intensifikasi Peternakan Sapi Sistem Zero Waste Secara terpadu untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tempatan di 2 (dua) Kecamatan Kabupaten Bengkalis	2017
15.	Lomba karya ilmiah se-Provinsi Riau	2017
16.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	2018
17.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Inovasi dan Teknologi	2019
18.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2019
19.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial dan Pemerintahan	2019

20.	Kajian model-model teknologi pedesaan dalam mendukung ekonomi pedesaan di Kabupaten Bengkalis	2019
21.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	2019
22.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Inovasi dan Teknologi	2020
23.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2020
24.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial dan Pemerintahan	2020
25.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	2020

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab Bengkalis, 2020

Diharapkan kedepan hasil-hasil kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dapat lebih dimanfaatkan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah kabupaten bengkalis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD 2021-2026.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp19.123.709.791,00 (Sembilan belas miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 85,94% dari dana yang

tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp21.676.876.909,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2016	Rp4.559.985.990,00	Rp3.596.134.420,00	78,86
2	2017	Rp4.225.592.923,00	Rp3.997.038.494,00	94,59
3	2018	Rp4.165.487.198,00	Rp3.241.544.923,00	77,82
4	2019	Rp4.518.109.349,00	Rp4.324.137.647,00	95,71
5	2020	Rp4.207.701.449,00	Rp3.964.854.307,00	94,23
Jumlah		Rp21.676.876.909,00	Rp19.123.709.791,00	85,94

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2016-2020 secara keseluruhan sudah optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung tertinggi terdapat pada Tahun 2017 yaitu 94,59% dan Tahun 2020 yakni mencapai 94,23%, sedangkan penyerapan anggaran yang terendah terdapat pada tahun 2018 yakni hanya mencapai 77,82%. Namun demikian perlu optimalisasi sisa anggaran yang tidak dapat digunakan sesuai tabel di atas mencapai Rp2.553.167.118,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp21.760.760.805,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp19.477.332.944,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar 92,17%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp6.135.324.637,00	Rp5.533.920.511,00	90,20
2	2017	Rp4.976.584.179,00	Rp4.644.644.739,00	93,33
3	2018	Rp3.126.162.735,00	Rp2.778.233.887,00	88,87
4	2019	Rp4.268.025.854,00	Rp3.983.013.310,00	93,32
5	2020	Rp3.254.663.400,00	Rp2.537.520.497,00	77,96
Jumlah		Rp21.760.760.805,00	Rp19.477.332.944,00	92,17

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Belanja Langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Penyerapan dana anggaran Belanja Langsung tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu mencapai 93,33% dan Tahun 2019 yakni mencapai 93,32%, sedangkan penyerapan anggaran yang terendah terdapat pada tahun 2020 yakni hanya mencapai 77,96%. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp2.283.427.861,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp7.720.208.547,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sejumlah Rp38.601.042.735,00 (tiga puluh

delapan miliar enam ratus satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.12.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Uraian Anggaran	Anggaran Pada Tahun (Rp.) Juta					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.) Juta					Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.) Juta					Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	4.559	4.225	4.165	4.518	4.207	3.596	3.997	3.241	4.324	3.964	78,86	94,59	77,82	95,70	94,23	21.676	19.123
Belanja Langsung	6.135	4.976	3.126	4.268	3.254	5.533	4.644	2.778	3.983	2.537	90,20	93,33	88,87	93,32	77,96	21.760	19.477
Total Anggaran	10.695	9.202	7.291	8.786	7.462	9.130	8.641	6.019	8.307	6.502	169	188	167	189	172	43.437	38.601

Sebagaimana pencapaian kinerja dan keuangan pada Tabel diatas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan perlu melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, serta secara terus menerus melakukan evaluasi atas pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, outcome program, maupun output kegiatan dalam upaya memperbaiki metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah, dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya ekonomi, politik, ideologi serta bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis memilih peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan sebagai lembaga pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa lembaga/organisasi untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan Analisis organisasi terhadap lingkungan strategis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis menghadapi berbagai tantangan maupun peluang baik dari dalam dalam organisasi maupun luar organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis. Untuk itu terdapat pengaruh lingkungan strategis yang dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut.

1. Internal (Kelemahan)

- a. Masih rendahnya budaya kerja dan disiplin ASN pada masing-masing bidang;
- b. Unit kerja belum memiliki SOP;
- c. Belum optimalnya Sumber Daya ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan, sehingga menyebabkan belum tercapainya tugas tanggungjawab secara cepat dan akurat;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan;
- e. Belum adanya Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

2. Internal (Kekuatan)

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan yang memiliki ukuran dan fungsi yang jelas dan tepat sehingga lebih jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara unit Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

3. Eksternal (Potensi)

- a. Dukungan Regulasi peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permen dan Perda dalam memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan yang berkualitas, dukungan regulasi tersebut juga membuka peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan kualitas hasil

- penelitian dalam mendukung inovasi pembangunan daerah khususnya regulasi yang ditetapkan oleh peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No.03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- b. Adanya dukungan teknologi, Informasi berbasis elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas peneliiian dan pengembangan sehingga dapat menghasilkan kualitas penelitian dan pengembangan yang lebih baik;
 - c. Terjalannya koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. Adanya Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Penelitian baik itu dari Universitas dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Lainnya.
4. Eksternal (Tantangan)
- a. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, namun kelembagaan yang menaungi belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Kompleknya permasalahan di Kabupaten Bengkalis baik dari aspek sosial, ekonomi, ekologi yang memerlukan penelitian dan pengembangan yang mendalam dan tepat;
 - c. Rendahnya implementasi hasil penelitian di tingkat pengambil keputusan
 - d. Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna;
 - e. Kurangnya pemahaman para pelaku kelitbangn terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - f. Kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin meningkat, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan

- kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Kabupaten Bengkalis;
- g. Peristiwa pandemic covid 19 mengharuskan Badan litbang agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan meningkatkan inovasi daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kunci utama membangun kemandirian daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran IPTEK sangat penting dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan daerah, memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil litbang memiliki daya saing di pasar nasional maupun global dan dapat mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbarui sumber keunggulan. Kemampuan IPTEK yang dimiliki oleh suatu daerah sangat menentukan daya saingnya dalam kancah perdagangan regional, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Bengkalis memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberprioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan strategis yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkalis makin mandiri dan sejahtera.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, Provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi terhadap peran tugas dan fungsi serta capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan pada periode sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang menjadi dasar identifikasi Permasalahan yang dihadapi serta akar permasalahan yang menjadi penyebabnya sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi pembangunan	Masih rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dihasilkan baik bidang Bidang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi.	<p>Belum tersedianya SDM fungsional peneliti</p> <p>Belum memiliki database informasi sebagai Data penunjang kegiatan penelitian</p> <p>Belum terbentuknya koordinasi yang maksimal terhadap instansi-instansi yang berhubungan dengan bidang penelitian dan pengembangan dalam memperoleh informasi terkini dari instansi yang bersangkutan termasuk jurnal-jurnal penelitian.</p> <p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan pengembangan termasuk dalam akses perolehan informasi yang masih minim.</p>

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) Tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) Tahun kedepan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama 5 (lima) Tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Misi pertama dan kedua dari RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dan penentuan program prioritas sesuai bidang urusan.

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan visi dan misi tersebut adalah dalam konteks perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pembinaan dalam upaya membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam lima tahun ke depan khususnya pada misi pertama dan kedua tersebut dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai Visi dan Misi daerah tahun 2021-2026. Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis secara konsisten mengupayakan semaksimal mungkin dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026 yang secara rinci dan jelas akan dijelaskan pada Bab V.

Keterkaitan faktor penghambat dan pendorong tugas-tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera ”.				
NO.	MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>MISI 1 Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian</p> <p>MISI 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter</p>	<p>Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi pembangunan</p>	<p>Rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dihasilkan baik bidang Bidang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi.</p>	<p>Perlu segera disediakan SDM fungsional peneliti</p> <p>Belum dibangun database informasi sebagai Data penunjang kegiatan penelitian</p> <p>Perlu ditingkatkan koordinasi yang maksimal terhadap instansi-instansi yang berhubungan dengan bidang penelitian dan pengembangan dalam memperoleh informasi terkini dari instansi yang bersangkutan termasuk jurnal-jurnal penelitian.</p> <p>Perlu disediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan pengembangan termasuk dalam akses perolehan informasi yang masih minim.</p> <p>Perlu segera disediakan SDM fungsional peneliti</p>

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dokumen terkait serta mempertimbangkan kondisi-kondisi terkini, terdapat isu-isu yang dihadapi pada pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan daerah
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang seluas-luasnya. Untuk itu diperlukan suatu pengembangan kebijakan pemerintah yang berkualitas didasari atas hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni memberikan kualitas kebijakan perkembangan daerah yang lebih nyata dan dapat memberi perubahan bagi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) Tahun kedepan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan yaitu *“Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas”*, dengan indikator pencapaian tujuan adalah *Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah* dengan target 85% pada Tahun 2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas hasil-hasil Penelitian dan pengembangan, dengan indikator sasaran adalah:
 - 1) Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah 85% pada tahun 2026.
2. Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi inovasi daerah, dengan indikator sasaran adalah:
 - 1) Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi sebanyak 25 OPD/Orang pada tahun 2026
 - 2) Rasio penilaian inovasi daerah yakni 4000 (sangat Inovatif) pada tahun 2026.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator sasaran adalah:
- 1) Predikat Akuntabilitas Kinerja BB pada Tahun 2026
 - 2) Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti 100% pada tahun 2026

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Penelitian dan Pengkajian Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas hasil-hasil Penelitian dan pengembangan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	67%	70%	75%	80%	85%
					2. Indeks Inovasi daerah	1. Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi inovasi daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah Yang Memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi	5 OPD	5 OPD
		2. Rasio penilaian inovasi daerah	50 (inovatif)	55 (Inovatif)				60 (sangat Inovatif)	65 (sangat Inovatif)
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB
				2. Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD sangat penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yaitu mendukung pencapaian misi ke-1 dan ke-2 RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 seperti rincian pada Tabel 4.1.

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah kendali langsung tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerjanya.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga perlu diperhatikan yang menyangkut dengan aspek peluang dan ancaman-ancaman seperti :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

c. Penyusunan Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Penelitian dan Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 1	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam danm Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Penguatan kapasitas kelembagaan penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung Data dan Informasi Inovasi Daerah	Peningkatan Kerjasama antar Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan Kerjasama antar Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
Misi 2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Masyarakat yang Berkarakter.			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penguatan komitmen dan pembinaan SAKIP	Penyelarasan dokumen perencanaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode Renstra Tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
 - c. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - d. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 - e. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;
 - f. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
 - f. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - g. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- h. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 - j. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - d. Perkebunan dan Pangan;
 - e. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
 - f. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral;
 - g. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
 - h. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 - i. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
 - j. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - k. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
 - b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - c. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
 - d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang;
 - e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yakni penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (5)
 Bidang Urusan : Penelitian dan Pengembangan (05)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		12												
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp													
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp															
Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelibangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Perencanaan, Kelembagaan dan Aparatur Perangkat Daerah	5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.081.816.852	100%	10.168.872.607	100%	10.334.699.554	100%	10.466.951.924	100%	10.601.063.223	100%	10.938.815.352	100%	10.938.815.352	Badan Penelitian dan Pengembangan											
				Terlaksananya penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	501.211.728	100%	806.461.728	100%	808.322.480	100%	824.458.589	100%	835.301.839	100%	939.599.274	100%	939.599.274	Badan Penelitian dan Pengembangan										
				Tersedianya hasil penyusunan perencanaan perangkat daerah	5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah	6	Dokumen	266.211.728	6	Dokumen	265.211.728	6	Dokumen	260.322.230	6	Dokumen	260.320.400	6	Dokumen	260.301.839	6	Dokumen	260.320.600	6	Dokumen	260.320.600	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Tersedianya hasil penyusunan perencanaan perangkat daerah	5	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah	-	40 Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	89.006.991	45	Berkas	89.006.991	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Tersedianya hasil penyusunan perencanaan perangkat daerah	5	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah	-	40 Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	50.000.000	45	Berkas	100.000.000	45	Berkas	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Tersedianya hasil penyusunan perencanaan anggaran perangkat daerah	5	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah	35	Berkas	105.000.000	40	Berkas	105.000.000	43	Berkas	105.250.250	45	Berkas	110.000.000	45	Berkas	110.000.000	45	Berkas	106.000.000	45	Berkas	106.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Tersedianya hasil penyusunan perencanaan anggaran perubahan perangkat daerah	5	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah	35	Berkas	75.000.000	40	Berkas	86.250.000	43	Berkas	85.250.000	45	Berkas	92.250.000	45	Berkas	100.000.000	45	Berkas	109.521.683	45	Berkas	109.521.683	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Tersedianya hasil capaian kinerja perangkat daerah	5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun oleh Perangkat Daerah	4	Dokumen	55.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	4	Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Terlaksananya pengukuran indeks kepemimpinan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	Rasio data yang dilaksanakan / dihasilkan (IKKD, IPKD, IISD)	-	-	3	Kategori	-	3	Kategori	-	3	Kategori	-	3	Kategori	-	3	Kategori	-	3	Kategori	-	3	Kategori	-	3	Kategori
				Tersedianya hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil evaluasi hasil Kinerja Perangkat Daerah	-	4	Dokumen	50.000.000	4	Dokumen	57.500.000	4	Dokumen	61.888.189	4	Dokumen	65.000.000	4	Dokumen	74.750.000	4	Dokumen	74.750.000	4	Dokumen	74.750.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	

Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah	5	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100%	5.161.649.848	100%	5.161.645.848	100%	5.161.645.848	100%	5.167.145.843	100%	5.161.645.843	100%	5.171.645.343	100%	5.171.645.343	Badan Penelitian dan Pengembangan			
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.111.649.848	100%	5.111.645.848	100%	5.111.645.848	100%	5.111.645.843	100%	5.111.645.843	100%	5.111.645.343	100%	5.111.645.343	Badan Penelitian dan Pengembangan		
Tersedianya hasil pelaporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.500.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
Terlaksananya pengelolaan aset perangkat daerah	5	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset	100%	192.000.000	100%	268.800.000	100%	268.800.000	100%	268.800.000	100%	268.800.000	100%	268.800.000	100%	268.800.000	100%	268.800.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya pengamanan kantor	5	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor dalam 1 Tahun	10 Orang	192.000.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
Terlaksananya manajemen kepegawaian Perangkat Daerah	5	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Kelitbangan sesuai Kompetensi	100%	400.000.000	100%	449.700.000	100%	360.000.000	100%	450.000.000	100%	360.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan identitas kelengkapan dinas aparatur	5	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam 1 tahun	80 Pcs	50.000.000	80 Pcs	89.700.000	-	-	80 Pcs	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya peningkatan kompetensi perencanaan aparatur	5	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN / Non ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar dalam 1 Tahun	20 Orang	175.000.000	22 Orang	180.000.000	24 Orang	180.000.000	26 Orang	185.000.000	28 Orang	180.000.000	30 Orang	205.000.000	30 Orang	205.000.000	30 Orang	205.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya peningkatan pemahaman teknis peraturan perundang-undangan aparatur	5	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	175.000.000	22 Orang	180.000.000	24 Orang	180.000.000	26 Orang	185.000.000	28 Orang	180.000.000	30 Orang	205.000.000	30 Orang	205.000.000	30 Orang	205.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	5	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	100%	1.205.000.000	100%	1.251.465.031	100%	1.311.681.226	100%	1.379.500.500	100%	1.364.034.841	100%	1.430.088.000	100%	1.430.088.000	100%	1.430.088.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
Tersedianya peralatan listrik kantor	5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan instalasi listrik yang tersedia dalam 1 Tahun	25 item	30.000.000	27 item	35.000.000	29 item	35.000.000	31 item	40.250.000	33 item	42.250.000	35 item	48.587.500	35 item	48.587.500	35 item	48.587.500	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat leburan kantor dalam 1 Tahun	35 item	155.000.000	37 item	165.230.000	39 item	165.000.000	40 item	189.750.000	40 item	191.284.341	40 item	200.000.000	40 item	200.000.000	40 item	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
							Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 Tahun	35 item		37 item	39 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item	40 item		
Tersedianya peralatan rumah tangga keperluan kantor	5	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	61.235.031	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	92.000.000	1 Tahun	92.000.000	1 Tahun	92.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan dalam 1 Tahun	3000 box	80.000.000	3200 box	80.000.000	3400 box	80.000.000	3600 box	80.000.000	3800 box	80.000.000	4000 box	100.000.000	4000 box	100.000.000	4000 box	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	15 item	140.000.000	17 item	150.000.000	20 item	156.681.226	22 item	160.500.500	22 item	160.500.500	22 item	160.500.500	22 item	160.500.500	22 item	160.500.500	Badan Penelitian dan Pengembangan
							Jumlah penyediaan informasi dalam 1 Tahun	5 item		7 item	10 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item	12 item		

Tersedianya bahan bacaan dan publikasi informasi	5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penitun Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Penitun Perundang-undangan yang tersedia dalam 1 Tahun	30 Media	50.000.000	30 Media	50.000.000	30 Media	50.000.000	30 Media	54.000.000	30 Media	50.000.000	30 Media	54.000.000	180 Media	54.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 Tahun	120 Kali	600.000.000	140 Kali	600.000.000	160 Kali	650.000.000	180 Kali	650.000.000	200 Kali	650.000.000	220 Kali	650.000.000	1020 Kali	650.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya pengolahan data dan informasi publik	5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya media informasi kelibangan	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	125.000.000	6 Tahun	125.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah sebagai aset	100%	1.020.000.000	100%	530.000.000	100%	775.000.000	100%	660.000.000	100%	1.075.000.000	100%	890.000.000	100%	890.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya kendaraan dinas jabatan	5	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 Unit	350.000.000	-	-	1 Unit	350.000.000	-	-	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya kendaraan dinas operasional	5	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	300.000.000	-	-	-	-	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya meubeler perlengkapan kantor	5	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	25 item	80.000.000	25 item	200.000.000	25 item	200.000.000	25 item	130.000.000	25 item	175.000.000	25 item	275.000.000	25 item	275.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	5	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	10 jenis	200.000.000	12 Jenis	230.000.000	15 Jenis	225.000.000	17 Jenis	230.000.000	20 Jenis	200.000.000	22 Jenis	230.000.000	22 Jenis	230.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya pembangunan taman / landscape BPP	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin kantor	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	528.400.000	100%	532.000.000	100%	530.000.000	100%	562.500.000	100%	575.162.500	100%	588.920.625	100%	588.920.625	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi kantor	5	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani 1 Tahun	1000 Surat	250.000.000	1000 Surat	250.000.000	1000 Surat	250.000.000	1000 Surat	250.000.000	1000 Surat	250.000.000	1000 Surat	250.000.000	1000 Surat	250.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
							Jumlah tenaga administrasi kantor dalam 1 Tahun	12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang	12 Orang		12 Orang		12 Orang	12 Orang		
Terpeenuhnya kebutuhan listrik, air dan sarana komunikasi	5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik kantor	1 Tahun	240.000.000	1 Tahun	252.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	262.500.000	1 Tahun	275.162.500	1 Tahun	288.920.625	1 Tahun	288.920.625	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi umum kantor	5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	2 Orang	38.400.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terpeenuhnya kondisi aset perangkat daerah yang baik	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Kantor	100%	1.073.555.276	100%	1.148.800.000	100%	1.099.250.000	100%	1.154.546.992	100%	961.118.200	100%	1.239.762.110	100%	1.239.762.110	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara kondisi dan izinnya dalam 1 Tahun	9 Unit	348.155.276	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	315.000.000	9 Unit	305.678.200	9 Unit	320.962.110	9 Unit	320.962.110	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya pemeliharaan meubeler perlengkapan kantor	5	05	01	2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor dalam 1 Tahun	100 item	75.000.000	100 item	80.000.000	100 item	80.000.000	100 item	100.000.000	100 item	80.000.000	100 item	150.000.000	100 item	150.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan

				Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja kantor	5	05	03	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor dalam 1 Tahun	70 item	70.000.000	70 item	100.000.000	70 item	100.000.000	70 item	70.746.992	70 item	80.000.000	70 item	100.000.000	70 item	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Terlaksananya kondisi kebersihan kantor	5	05	03	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dalam 1 Tahun	12 Orang	230.400.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	14 Orang	268.800.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	5	05	03	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor	2 Kali	350.000.000	2 Kali	400.000.000	2 Kali	350.450.000	2 Kali	400.000.000	2 Kali	226.640.000	2 Kali	400.000.000	2 Kali	400.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Terlaksananya penyusunan hasil penelitian dan pengembangan inovatif dan teknologi pembangunan daerah	5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah	65%	8.248.759.243	67%	8.319.986.678	70%	8.455.663.271	75%	8.563.869.756	80%	8.673.397.182	85%	8.949.999.833	85%	8.949.999.833	Badan Penelitian dan Pengembangan		
			Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Dalam Mewujudkan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah Yang Memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi bidang pemerintahan	65%	2.750.000.000	67%	2.450.000.000	70%	1.700.000.000	75%	2.180.000.000	80%	2.442.500.000	85%	2.760.000.000	85%	2.760.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
					5	05	02	2.01	01	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen kajian atau kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
				Terlaksananya pengukuran indeks kepemimpinan Kepala Daerah	5	05	02	2.01	02	fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah hasil pengukuran indeks kepemimpinan Kepala Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Terlaksananya penelitian tepat guna di masyarakat dan lingkup Pemerintah Daerah	5	05	02	2.01	03	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah hasil penelitian tepat guna di masyarakat dan Pemerintah Daerah	3 Judul Penelitian	450.000.000	6 Judul Penelitian	200.000.000	6 Judul Penelitian	250.000.000	6 Judul Penelitian	200.000.000	6 Judul Penelitian	200.000.000	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	
				Terlaksananya penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	5	05	02	2.01	04	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terkoordinasinya dan menguatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 Kali	400.000.000	2 Kali	300.000.000	2 Kali	300.000.000	2 Kali	300.000.000	2 Kali	400.000.000	2 Kali	400.000.000	2 Kali	400.000.000	2 Kali	400.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
										Terusunnya rancangan roadmap SIDa	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan		
										Terlaksananya workshop radar inovasi daerah (RIDa)	-	-	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Badan Penelitian dan Pengembangan		
					5	05	02	2.01	05	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen kajian atau kebijakan keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
					5	05	02	2.01	06	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketahanan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ketahanan umum dan perlindungan masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
					5	05	02	2.01	07	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Terlaksananya fasilitasi teknis kajian ketatalaksanaan Desa	5	05	02	2.01	08	fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah rekomendasi teknis implementasi kajian ketatalaksanaan Desa	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					5	05	02	2.01	09	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah dokumen kajian atau kebijakan Aparatur Desa	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					5	05	02	2.01	10	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen kajian atau kebijakan Keuangan dan Aset Desa	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan

					Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola BUMDES	5	05	02	2011	11	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah rekomendasi emendasi potensi desa untuk mendukung pengembangan BUMDES	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan		
					Terlaksananya koordinasi pengelolaan data SIDA	5	05	02	2012	12	Pengelolaan Data Kelitangan dan Peraturan	Jumlah terlaksananya Rapat Koordinasi tentang data kelitangan dan peraturan	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
						5	05	02	2013	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah evaluasi peraturan atau kebijakan yang dilaksanakan	1 Peraturan	100.000.000	-	-	1 Peraturan	100.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	172.500.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	1 Peraturan	150.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
						5	05	02	2014	14	fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi teknis kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
						5	05	02	2015	15	fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi pemberian izin penelitian yang diberikan untuk WNA oleh instansi yang berwenang	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
					Terlaksananya penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan bidang sosial dan Kependudukan	5	05	02	202	202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	65%	1.500.000.000	67%	2.044.986.678	70%	1.550.000.000	75%	1.700.000.000	80%	1.350.000.000	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	85%	1.580.439.833	Badan Penelitian dan Pengembangan		
						5	05	02	202	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
						5	05	02	202	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan		
						5	05	02	202	03	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penelitian dan kebudayaan	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan			
						5	05	02	202	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
						5	05	02	202	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pariwisata	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
						5	05	02	202	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
						5	05	02	202	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	
						5	05	02	202	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	1 Dokumen	220.439.833	Badan Penelitian dan Pengembangan
						5	05	02	202	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Implementasi teknis kajian tenaga kerja	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
						5	05	02	202	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	284.986.678	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
						5	05	02	202	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Transmigrasi	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan		

Kategori	Sub-kategori	Kode	Tahun	Judul Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Badan Penelitian dan Pengembangan																									
													65%	70%	75%	80%	85%	90%	65%	70%	75%	80%	85%	90%																										
Tertindaknya penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan bidang Ekonomi Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	65%	2.700.000.000	67%	2.425.000.000	70%	3.455.663.271	75%	3.345.000.000	80%	3.681.097.182	85%	3.059.500.000	85%	3.059.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan																									
																										Tertindaknya pengembangan turunan minyak atsiri	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	460.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan			
																										Tertindaknya pengujian produk perindustrian dan perdagangan	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	30 Produk	250.000.000	45 Produk	200.000.000	45 Produk	145.663.271	50 Produk	250.000.000	55 Produk	287.500.000	60 Produk	300.000.000	60 Produk	300.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan			
																										Tertindaknya kultur dan ekayasa tanaman	5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 Jenis	500.000.000	5 Jenis	575.000.000	5 Jenis	550.000.000	5 Jenis	600.000.000	5 Jenis	690.000.000	5 Jenis	575.000.000	5 Jenis	575.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan			
																										Tertindaknya uji coba keehatan dan perikanan	5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	402.500.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan			
																										Tertindaknya pengembangan energi dan sumberdaya mineral	5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	287.500.000	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	
																										Tertindaknya pengembangan lingkungan hidup	5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	345.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
																										Tertindaknya pengembangan keehatan	5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Keehatan	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
																										Tertindaknya pengembangan pekerjaan umum	5	05	02	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	300.000.000	-	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
																										Tertindaknya pengembangan perhubungan	5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
																										Tertindaknya pengembangan rumah instant sederhana sehat (RISHA)	5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Pemukiman dan Kawasan Permukiman	20 Orang	250.000.000	20 Orang	150.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tertindaknya pengembangan smart city	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan																										
																									Tertindaknya pengembangan smart city yang dihasilkan	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	460.000.000	-	-	1 Dokumen	353.597.182	1 Dokumen	384.500.000	1 Dokumen	384.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan										
																									Tertindaknya pengembangan inovasi dan teknologi pembangunan daerah	5	05	02	2.04	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	65%	1.298.759.243	67%	1.400.000.000	70%	1.750.000.000	75%	1.338.869.756	80%	1.200.000.000	85%	1.550.000.000	85%	1.550.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan					
Tertindaknya pengolahan Stasiun Riset dan Kajian Abrasi Pantai yang ditindaklanjuti	5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Tahun	198.759.243	-	200.000.000	-	200.000.000	-	238.869.756	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan																											
Tertindaknya uji coba dan penerapan rancang bangun penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Jenis	100.000.000	1 Jenis	150.000.000	1 Jenis	300.000.000	-	-	-	-	1 Jenis	200.000.000	1 Jenis	200.000.000	1 Jenis	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan																											

Terlaksananya diseminasi prosedur penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi ekosistem yang berdaya saing	5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Frekuensi dilaksanakan diseminasi terkait prosedur atau metode penyelenggaraan pemerintahan yang didiseminasikan dalam setahun	3 Kali	200.000.000	3 Kali	200.000.000	3 Kali	200.000.000	3 Kali	200.000.000	3 Kali	200.000.000	3 Kali	200.000.000	3 Kali	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
							Frekuensi dilakukan pemetaan ekosistem inovasi dan daya saing daerah	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
Terlaksananya diseminasi dan tindak lanjut hasil kajian ketlibangan	5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Ketlibangan	Jumlah hasil-hasil penelitian yang didiseminasikan	3 Kali	300.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	300.000.000	6 Kali	350.000.000	6 Kali	350.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
							Jumlah hasil ketlibangan yang ditindaklanjuti ke dalam bentuk kajian			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Terlaksananya penghargaan inovatif dan hak kekayaan intelektual	5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah penghargaan inovatif yang diberikan	3 Kategori	500.000.000	5 Kategori	500.000.000	5 Kategori	700.000.000	5 Kategori	550.000.000	5 Kategori	500.000.000	5 Kategori	600.000.000	5 Kategori	600.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
							Jumlah inovasi yang diberikan hak kekayaan intelektual	100 HAKI		150 HAKI		150 HAKI		150 HAKI		150 HAKI		150 HAKI		150 HAKI		

Bengkalis, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**



FADHLAN FUAD DAULAY, AP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19751001 199412 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*ongoing*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi

program perangkat daerah Badan Penelitian dan Pengembangan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan hasil penelitian yang semakin membaik dari Tahun ke Tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja penelitian yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. dibawah ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	67%	70%	75%	80%	85%
		2. Indeks Inovasi Daerah	1. Meningkatnya Peran Aktif Perangkat Daerah dalam mendukung Data dan Informasi Inovasi Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah Yang Memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD
				2. Rasio Penilaian Inovasi Daerah	50 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (sangat Inovatif)	65 (sangat Inovatif)	70 (sangat Inovatif)
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB
				2. Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Hasil kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$
			2. Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Inovasi Perangkat Daerah dalam Satu Tahun	$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggungjawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturanperundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja Tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasara nyang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program / kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi

Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Penelitian dan Pengkajian Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja dilingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap Tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku;
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggungjawab penuh dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini;

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam lima Tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui Renja Badan Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun dan realisasinya melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Badan Penelitian dan Pengembangan tiap Tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA pertriwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mencapai sasaran Renstra;
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan;
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(4)	(5)	(6)	
1.	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Hasil kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
2.	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Inovasi Perangkat Daerah dalam Satu Tahun	$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$	

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

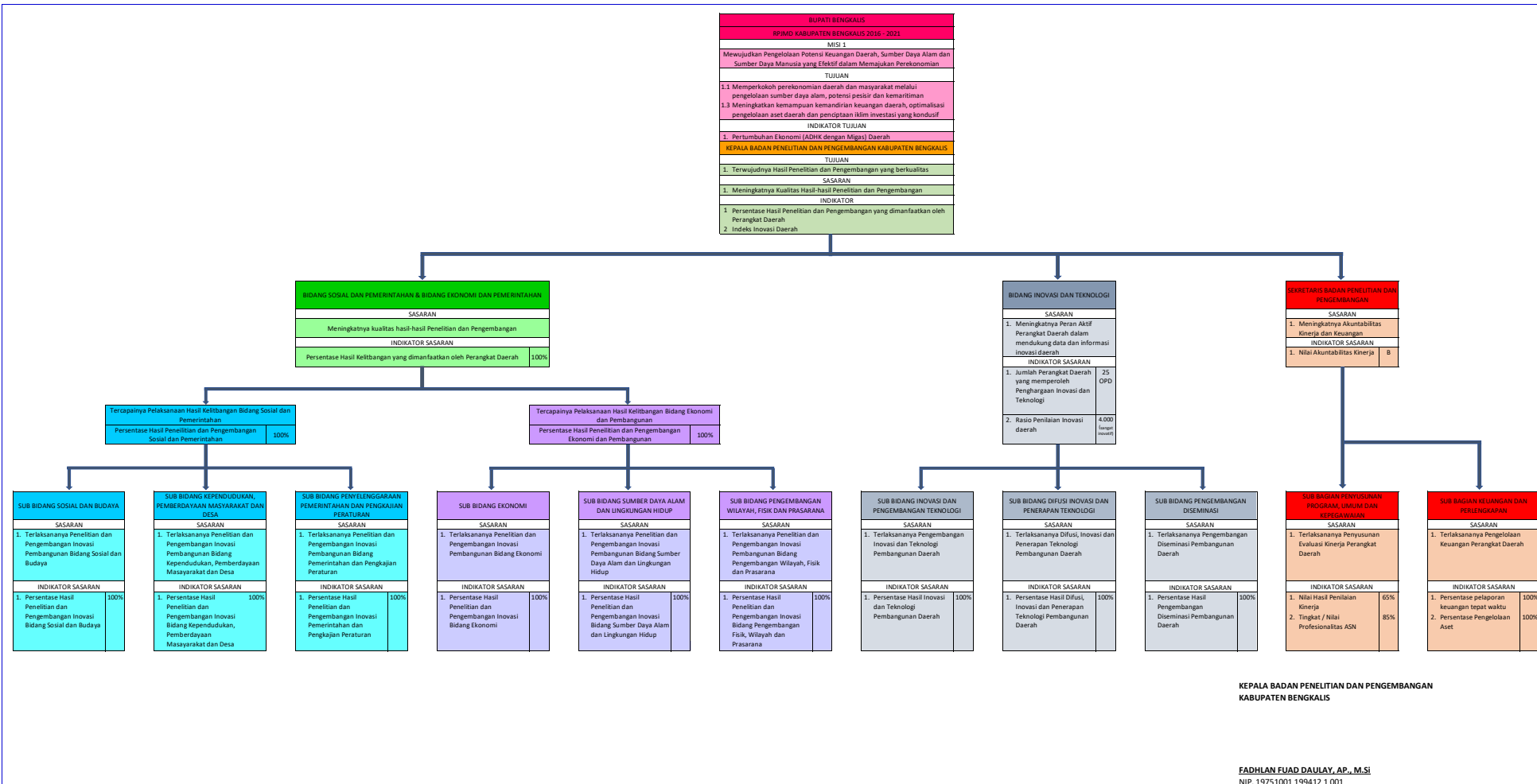


FADHLAN FUAD DAULAY, AP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19751001 199412 1 001

CASCADING BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026



FORMULASI STRATEGI SWOT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016-2020

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 2. Kesempatan kepada SDA untuk meningkatkan kompetensinya dibidang kelitbangan; 3. Perkembangan Inovasi dan Teknologi yang semakin tinggi; 4. Kesadaran perlunya Badan Litbang di daerah; 5. Penerapan Otonomi Daerah dan Era Globalisasi; 6. Adanya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. 	<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen untuk menjadikan kegiatan Penelitian sebagai pilar terdepan masih dalam batas yang normatif; 2. Kondisi Kabupaten Bengkalis yang merupakan daerah Kepulauan; 3. Kurangnya koordinasi antar Instansi dalam pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 4. Kebijakan Pembangunan masih dipengaruhi oleh Dinamika Politik.
<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; Tersedianya Struktur Organisasi 2. Litbang yang jelas; Tersedianya Sumber Daya 3. Aparatur; Adanya dukungan dari Pemerintah 4. Daerah dalam bentuk Pengalokasian Anggaran. 	<p>Alternatif Strategis (S-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk kebijakan Program dan Kegiatan melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. 	<p>Alternatif Strategi (S-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi antar Instansi dan lembaga baik di Daerah maupun Pusat untuk menyelaraskan pemikiran dalam menentukan kebijakan pembangunan.
<p>Kelemahan (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana belum memadai; 2. SDM belum memadai (belum memiliki Fungsional Peneliti dan Perakayasa); 3. Belum optimalnya distribusi data sebagai lahan masukan penyusunan hasil penelitian / kajian; 4. Belum terintegrasinya sistem informasi kelitbangan; 5. Belum optimalnya Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Penelitian. 	<p>Kelemahan (W-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Badan Litbang; 2. Peningkatan Diseminasi dan Difusi untuk pengembangan inovasi daerah; 3. Penguatan fungsi kelitbangan dalam pembangunan daerah. 	<p>Alternatif Strategi (W-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Badan Litbang, Baik Tenaga Fungsional Peneliti maupun Tenaga Struktural; Meningkatkan kerjasama 2. dengan Lembaga Penelitian.